

# Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia



# Capaian Pembelajaran

- Mahasiswa dapat menjelaskan indikator dan faktor-faktor penyebab kemiskinan
- Mahasiswa mampu menyusun konsep penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia

# Potret Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

- 258 juta penduduk
- 27,76 juta penduduk miskin
- 14,4 juta petani tanpa lahan
- 9,7 juta KK pekebun bernilai tambah rendah
- 13,5 juta warga tanpa hunian yang layak
- 11,2 juta pedagang tradisional kurang bersaing dengan pedagang modern



# Kemiskinan sangat identik dengan beberapa variabel berikut ini:


---

- Kepemilikan modal
- Kepemilikan lahan
- Sumber daya manusia
- Kekurangan gizi
- Pendidikan
- Pelayanan kesehatan
- Pendapatan perkapita
- Minimnya investasi

# Parameter Kemiskinan :

---

- W. SCOTT (1979) : Kemiskinan diukur dari pendapatan rata-rata per kepala (*income percapita*)
- A. SEN (1977) : Melihat dari kebutuhan dasar (*basic needs*)
- WORLD BANK : Mengukur kemiskinan dengan mematok minimal pengeluaran US\$ 2 per hari. Jika dibawah itu termasuk kategori kemiskinan absolut.
- UNDP (United Nations Developed Program) : mengukur kemiskinan dengan melihat Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index –HPI*)

UNDP  kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three Key Deprivations*), yaitu :

---

1) Kehidupan

(lebih dari 30% penduduk negara-negara berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun)

2) Pendidikan Dasar

(dilihat dari presentasi tingkat penduduk dewasa yang buta huruf ,dan seterusnya)

3) Ketetapan Ekonomi

(dilihat dari jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses kesehatan, jumlah anak-anak dibawah 5 tahun yang kekurangan berat badan)

# Sudut Pandang mengukur Kemiskinan:

---

- SAYOGO (1997) : melihat atau mengukur kemiskinan dari tingkat konsumsi beras perkapita pertahun:
  - Jika konsumsi dibawah 420 kg untuk kota = miskin
  - Jika Konsumsi dibawah 320 kg untuk pedesaan = miskin

Biro Pusat Statistik (BPS) :

Kemiskinan dilihat atau diukur dari jumlah pengeluaran tiap bulan.

# Entang Sastraatmadja (2003):

---



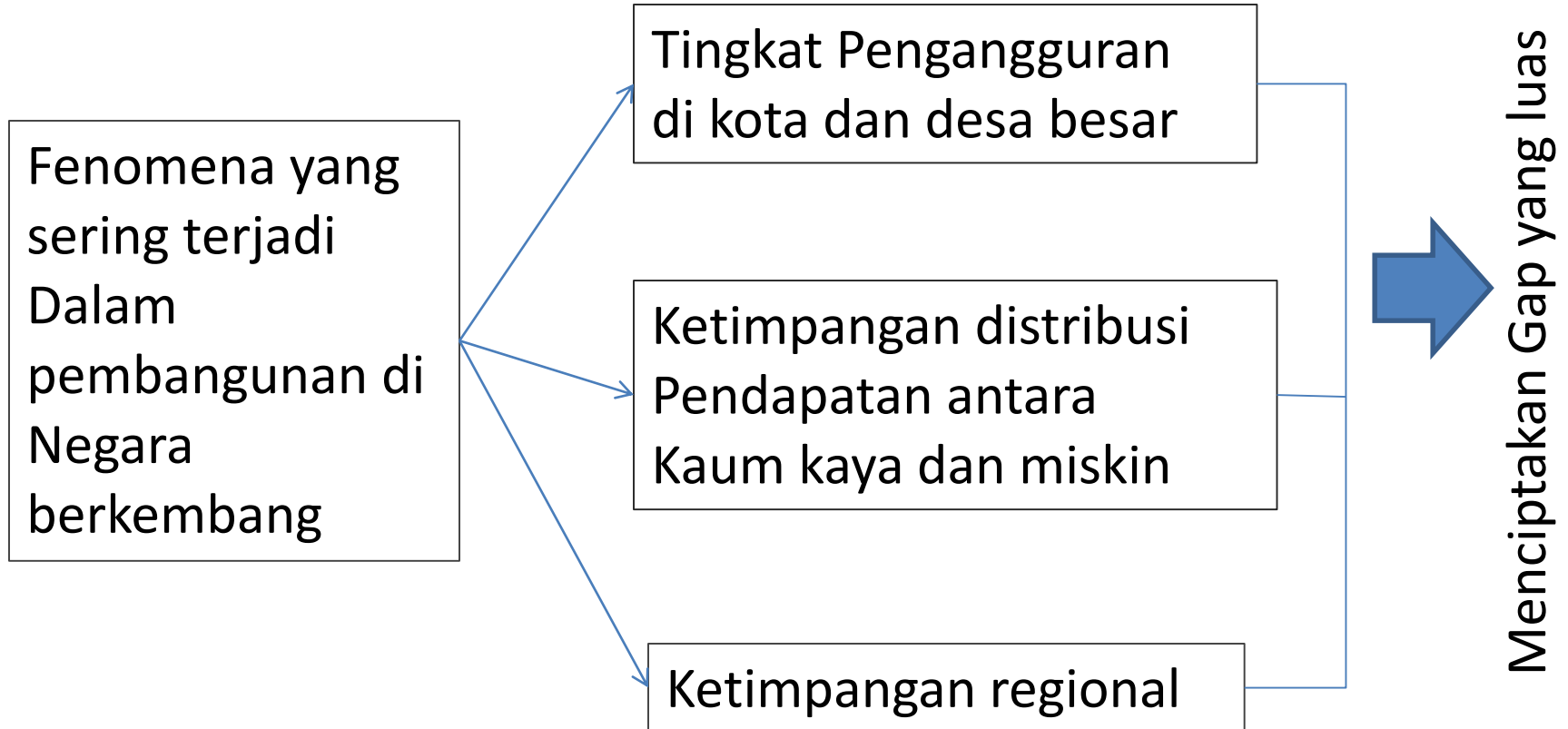
Kemiskinan dilihat atau diukur dari berdasarkan pola waktu (sastraatmadja; 2003) :

---

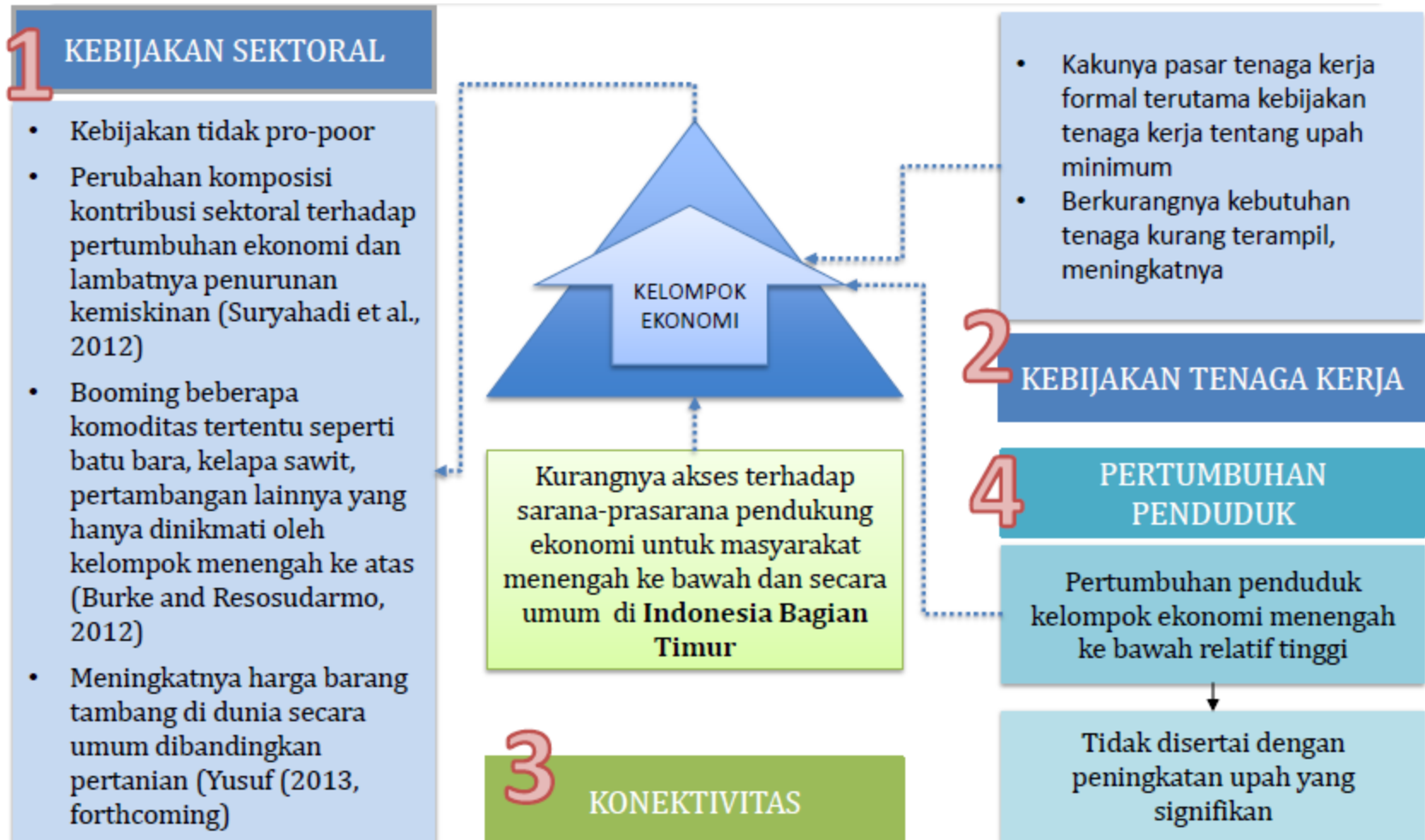
1. **PERSISTENT POVERTY**, yakni kemiskinan yang kronis atau terjadi secara turun temurun.
2. **CYCLICAL POVERTY**, yaitu kemiskinan yang terjadi karena mengikuti siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. **SEASONAL POVERTY**, yaitu kemiskinan musiman yang terjadi berdasarkan masa-masa tertentu, misalnya masa paceklik bagi petani, dst.
4. **ACCIDENT POVERTY**, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik & kekerasan atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan suatu masyarakat.

# MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

---



# Faktor Penyebab Kesenjangan

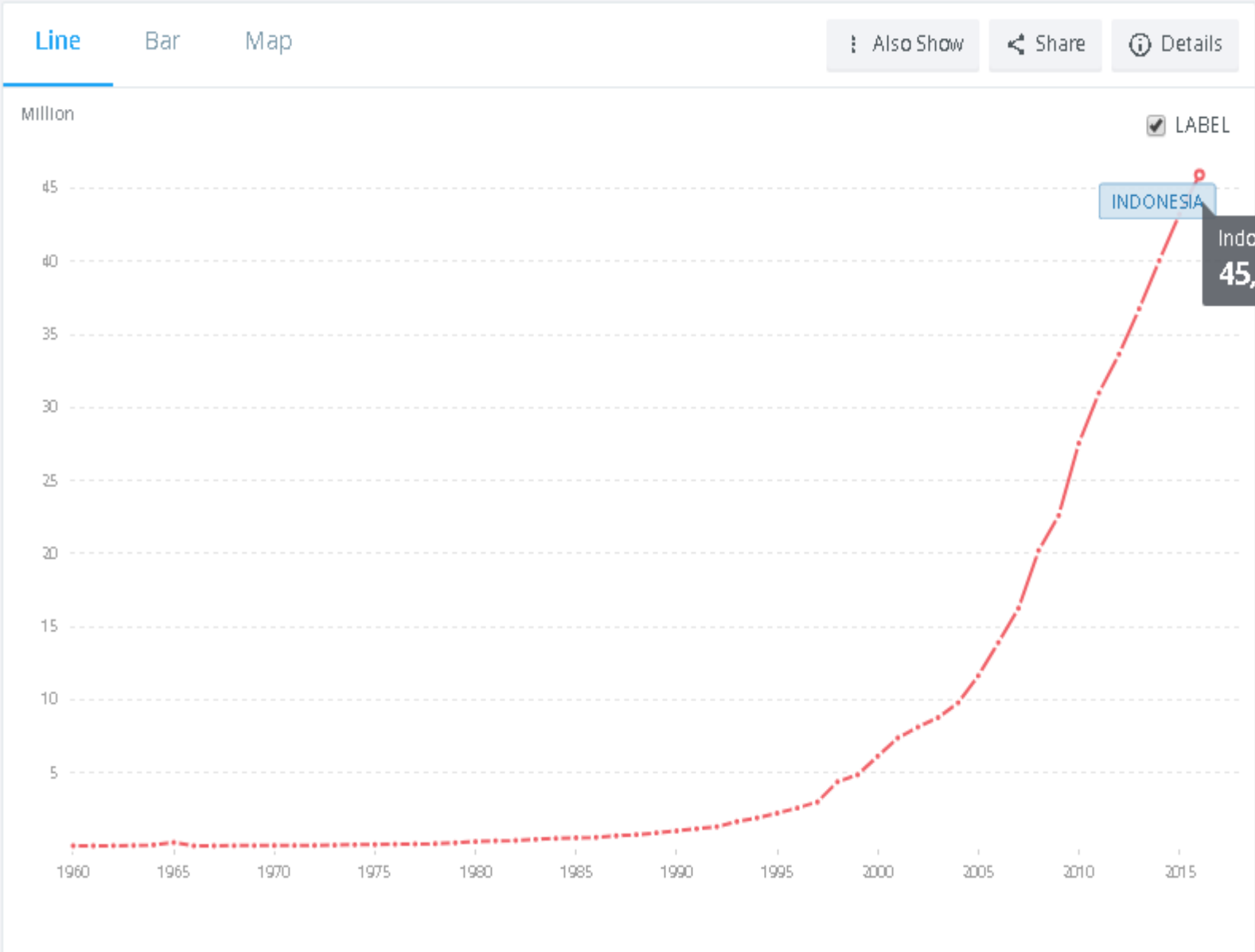


- Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dengan timpangnya pertumbuhan pengeluaran antar kelompok masyarakat
- Kesenjangan non-ekonomi ditunjukkan dengan adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, dan pelayanan dasar lainnya
- Kesenjangan antar wilayah masih terus terjadi

# GNI per capita (current LCU)

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

License: [Open](#)



GNI, Atlas method

GNI (current LCU)

GNI, PPP (constant

Indonesia (2016)  
45,905,829.325

GNI per capita (c

GNI per capita gr

GNI per capita (c

GNI per capita, P



Download  
[CSV](#)

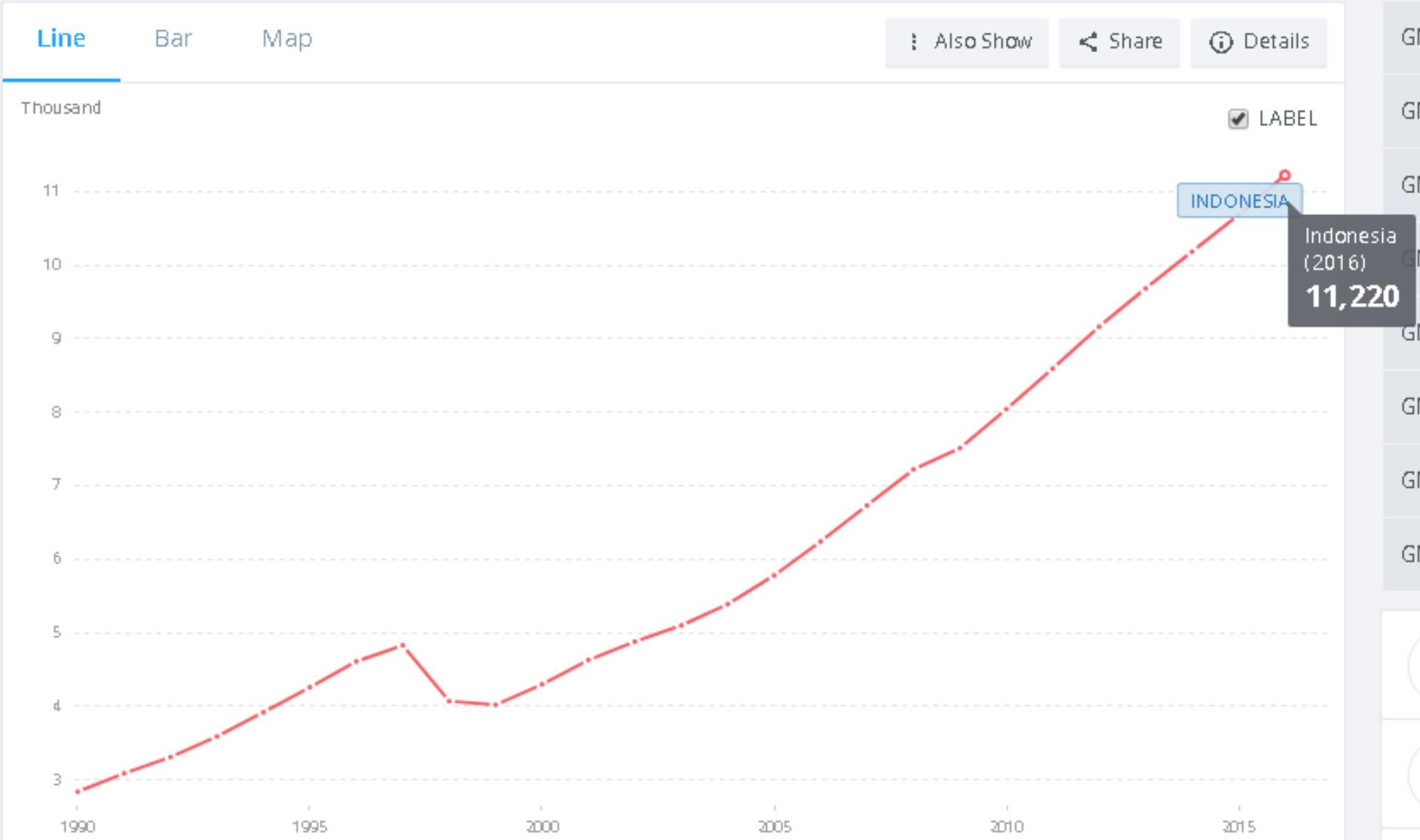


Data  
Online

# GNI per capita, PPP (current international \$)

World Bank, International Comparison Program database.

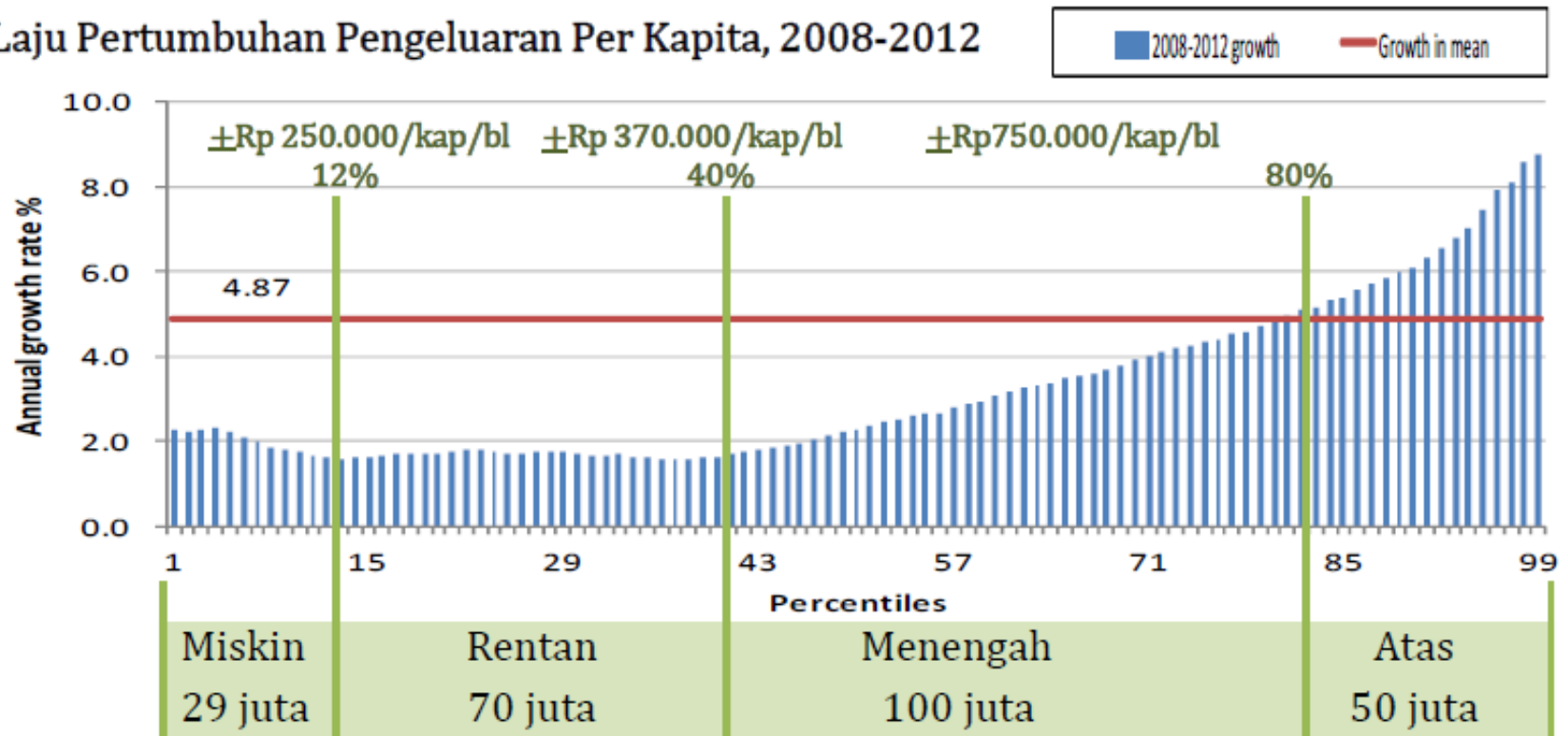
License: [Open](#)



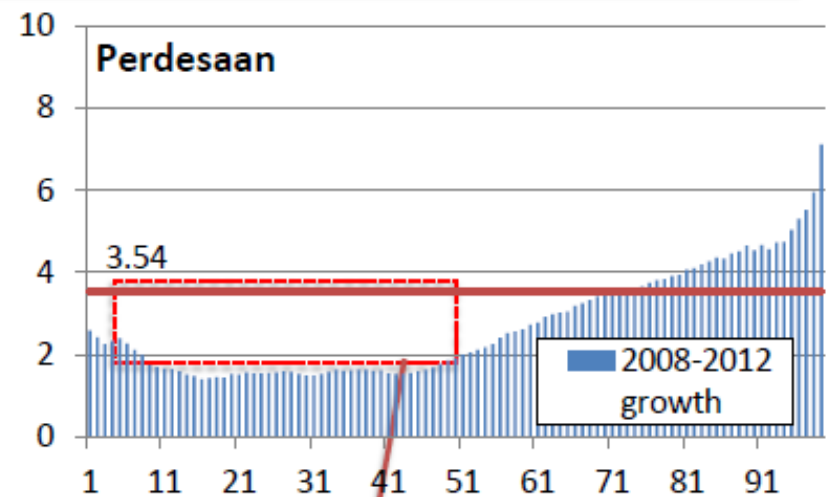
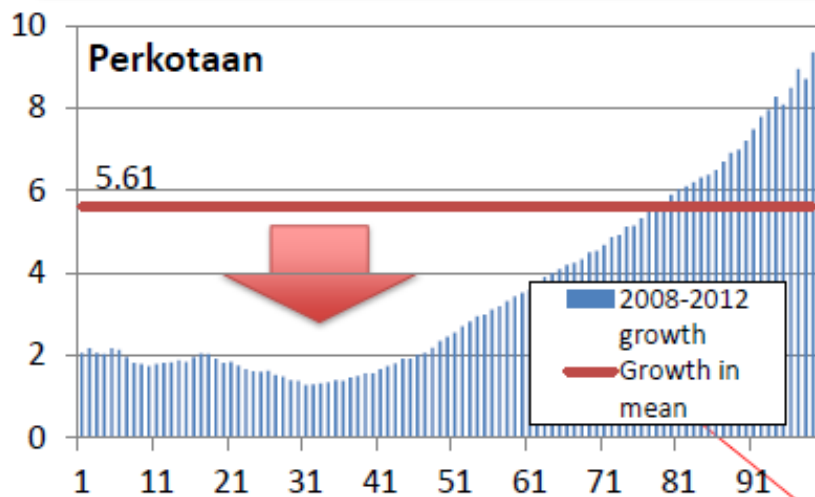
GN  
GN  
GN  
GN  
GN  
GN  
GN  
GN

# Kesenjangan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012



# Kesenjangan Ekonomi

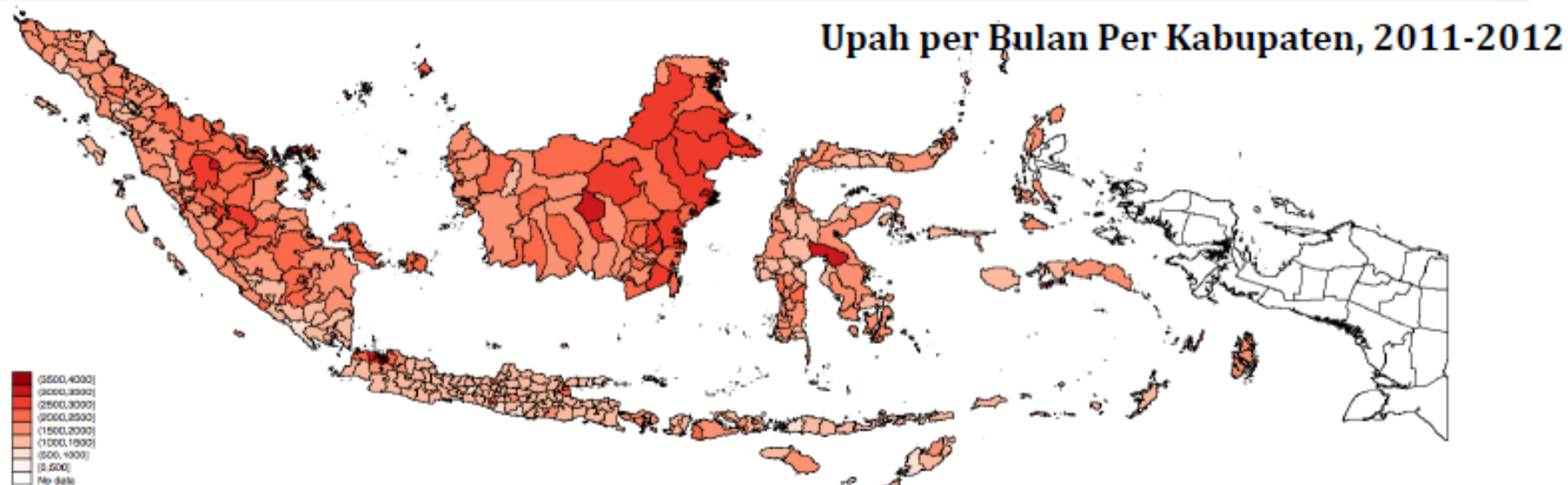


Sumber: TNP2K, Prof. Suahasil Nazara

- Di perdesaan, pertumbuhan pengeluaran, meningkat mulai percentile ke 40 dan 30 persen terkaya di atas rata-rata.
- Di perkotaan, pendapatan riil buruh diperkirakan tidak mengalami perubahan, sementara pendapatan riil tenaga profesional meningkat.
- Jumlah buruh non-pertanian meningkat

Intervensi sangat diperlukan untuk group menengah dan terendah.

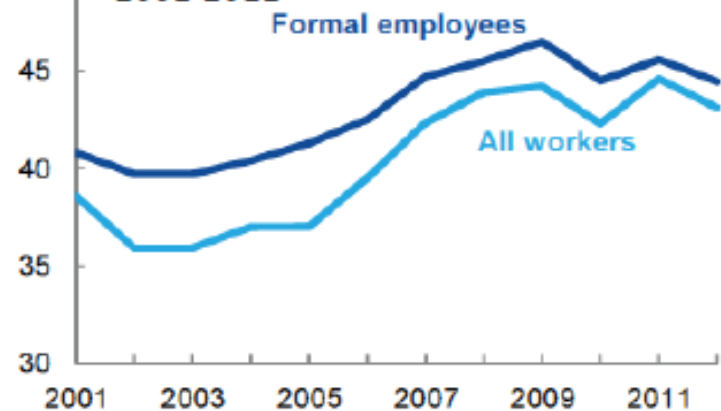
Khususnya yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, akses terhadap modal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif



Sumber : Melanie Morten, Stanford University, 2014

- Pekerja dengan keahlian yang tinggi mendapatkan upah relatif jauh lebih besar dibandingkan pekerja biasa
- Upah pekerja formal relatif lebih tinggi dibandingkan upah pekerja di sektor informal
- Pekerja sektor formal lebih banyak di pusat-pusat ekonomi terutama Indonesia Bagian Barat atau daerah dengan kaya hasil bumi

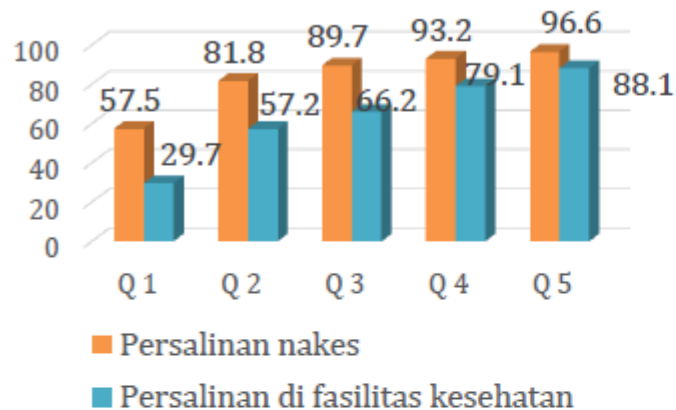
Labor Income Pekerja Formal vs Semua Pekerja, 2001-2011



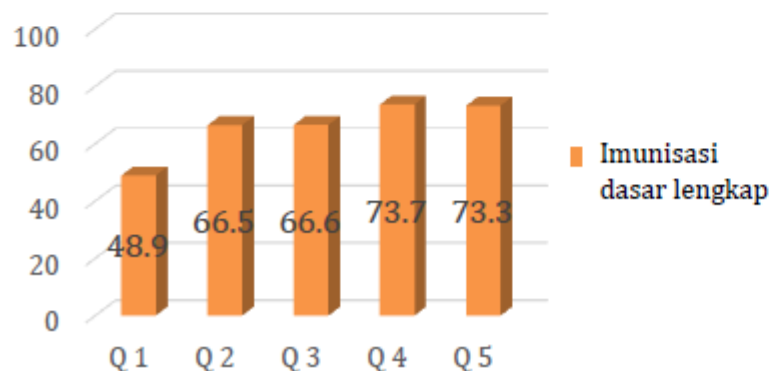
Sumber: IEQ Juli 2014, World Bank

# Kesenjangan Non -Ekonomi

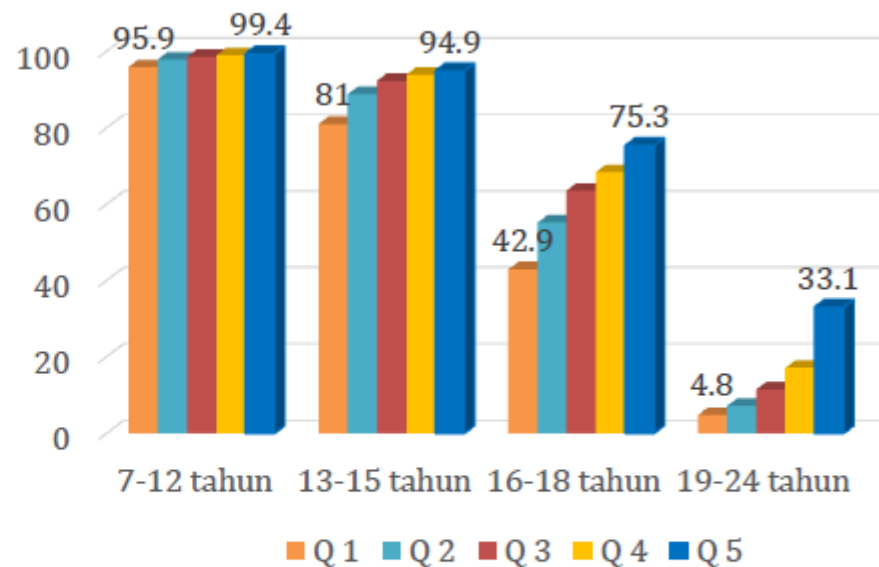
Kesehatan Ibu



Kesehatan Anak



Angka Partisipasi Sekolah (2012)



## AKSES PENDIDIKAN:

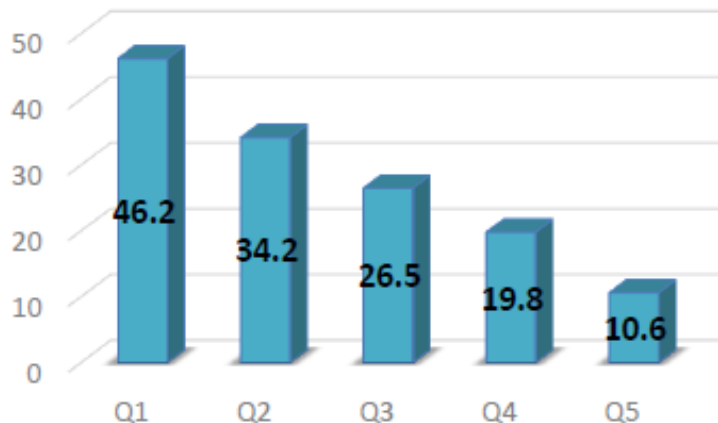
Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih tua

## AKSES KESEHATAN:

Kesenjangan terjadi pada kesehatan ibu dan anak

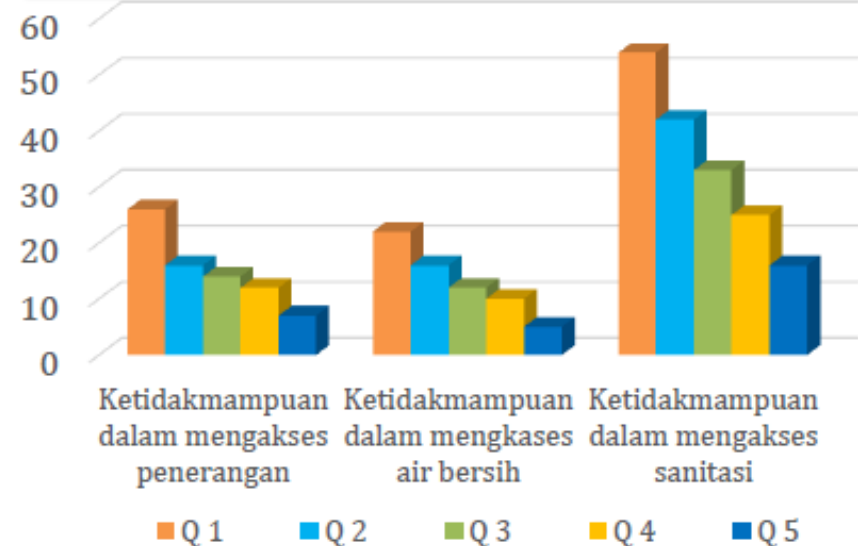
# Kesenjangan Non- Ekonomi

Proporsi Anak Tanpa Akte Kelahiran Berdasarkan Kuantil Pendapatan (%)



- 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir
- Kepemilikan akta kelahiran yang terbatas membuat terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan gratis serta jaminan sosial lainnya

Kesenjangan terhadap Akses Infrastruktur Penerangan, Air Bersih, dan Sanitasi



Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif

# Dampak Kesenjangan

- **Kesenjangan memiliki potensi dampak negatif terhadap sosial dan politik.**

Meskipun ekonomi tumbuh, namun terdapat persepsi publik bahwa kesejahteraan belum dinikmati semua orang/belum adil dan merata.

- **Kesenjangan yang meningkat akan mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal:**

Perubahan pola permintaan

Perubahan ukuran pasar domestik

Berkurangnya kegiatan kewirausahaan

Keterkaitan ekonomi politik dan instabilitas bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi

- **Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi**

Masih cukup besar jumlah masyarakat miskin dan rentan yang tidak terlindungi/mendapatkan manfaat bantuan dan jaminan sosial.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran untuk menurunkan tingkat koefisien Gini. Agar berhasil mencapai sasaran tersebut, Indonesia perlu mengatasi empat penyebab ketimpangan, yaitu:

- 1.Ketimpangan peluang.
- 2.Ketimpangan pasar kerja.
- 3.Konsentrasi kekayaan.
- 4.Ketimpangan dalam menghadapi goncangan.

(sumber : [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org))

# Hal-hal atau isu sentral yang harus menjadi fokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan :

---

- Upaya penganggulangan kemiskinan harus bersifat *“local spesific”*
- Upaya penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah harus diikuti dengan :
  - a) Kebijakan *“land reform”* melalui aturan daerah
  - b) Terciptanya demokrasi ekonomi rakyat dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan
  - c) Terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai ekonomi rakyat
  - d) Partisipasi kaum wanita dalam pengambilan keputusan harus lebih proporsional

- Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga,
- Harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- Penanganan kemiskinan harus menyentuh dua area sasaran aksi:
  - Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
  - Meningkatkan pelayanan masyarakat
- Penanggulangan kemiskinan => dari masyarakat untuk masyarakat

No	Provinsi	2015	2016	2017
1	ACEH	0.339	0.341	0.329
2	SUMATERA UTARA	0.326	0.312	0.315
3	SUMATERA BARAT	0.319	0.312	0.318
4	RIAU	0.366	0.347	0.325
5	JAMBI	0.344	0.346	0.335
6	SUMATERA SELATAN	0.334	0.362	0.361
7	BENGKULU	0.371	0.354	0.351
8	LAMPUNG	0.352	0.358	0.334
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0.275	0.288	0.282
10	KEP. RIAU	0.339	0.352	0.334
11	DKI JAKARTA	0.421	0.397	0.413
12	JAWA BARAT	0.426	0.402	0.403
13	JAWA TENGAH	0.382	0.357	0.365
14	DI YOGYAKARTA	0.420	0.425	0.432
15	JAWA TIMUR	0.403	0.402	0.396
16	BANTEN	0.386	0.392	0.382
17	BALI	0.399	0.374	0.384
18	NUSA TENGGARA BARAT	0.360	0.365	0.371
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0.348	0.362	0.359
20	KALIMANTAN BARAT	0.330	0.331	0.327

No	Provinsi	2015	2016	2017
21	KALIMANTAN TENGAH	0.300	0.347	0.343
22	KALIMANTAN SELATAN	0.334	0.351	0.347
23	KALIMANTAN TIMUR	0.315	0.328	0.330
24	KALIMANTAN UTARA	0.314	0.305	0.308
25	SULAWESI UTARA	0.366	0.379	0.396
26	SULAWESI TENGAH	0.370	0.347	0.355
27	SULAWESI SELATAN	0.404	0.400	0.407
28	SULAWESI TENGGARA	0.381	0.388	0.394
29	GORONTALO	0.401	0.410	0.430
30	SULAWESI BARAT	0.362	0.371	0.354
31	MALUKU	0.338	0.344	0.343
32	MALUKU UTARA	0.286	0.309	0.317
33	PAPUA BARAT	0.428	0.401	0.390
34	PAPUA	0.392	0.399	0.397
35	INDONESIA	0.402	0.394	0.393

### **Koefisien Gini :**

*Digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan yang angkanya berkisar dari 0 - 1*

Data : Badan Pusat Statistik  
(BPS - Statistics Indonesia)

## Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2015-2017

No	Provinsi	2015	2016	2017
1	ACEH	859.41	841.31	872.61
2	SUMATERA UTARA	1508.14	1452.55	1453.87
3	SUMATERA BARAT	349.53	376.51	364.51
4	RIAU	562.92	501.59	514.62
5	JAMBI	311.56	290.81	286.55
6	SUMATERA SELATAN	1112.53	1096.50	1086.92
7	BENGKULU	322.83	325.60	316.98
8	LAMPUNG	1100.68	1139.78	1131.73
9	KEP. BANGKA BELITUNG	66.62	71.07	74.09
10	KEP. RIAU	114.83	119.14	125.37
11	DKI JAKARTA	368.67	385.84	389.69
12	JAWA BARAT	4485.65	4168.11	4168.44
13	JAWA TENGAH	4505.78	4493.75	4450.72
14	DI YOGYAKARTA	485.56	488.83	488.53
15	JAWA TIMUR	4775.97	4638.53	4617.01
16	BANTEN	690.67	657.74	675.04
17	BALI	218.79	174.94	180.13
18	NUSA TENGGARA BARAT	802.29	786.58	793.78
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1160.53	1150.08	1150.79
20	KALIMANTAN BARAT	405.51	390.32	387.43

No	Provinsi	2015	2016	2017
21	KALIMANTAN TENGAH	148.13	137.46	139.16
22	KALIMANTAN SELATAN	189.16	184.16	193.92
23	KALIMANTAN TIMUR	209.99	211.24	220.17
24	KALIMANTAN UTARA	40.93	47.03	49.47
25	SULAWESI UTARA	217.15	200.35	198.88
26	SULAWESI TENGAH	406.34	413.15	417.87
27	SULAWESI SELATAN	864.51	796.81	813.07
28	SULAWESI TENGGARA	345.02	327.29	331.71
29	GORONTALO	206.51	203.69	205.37
30	SULAWESI BARAT	153.21	146.90	149.76
31	MALUKU	327.78	331.79	320.51
32	MALUKU UTARA	72.65	76.40	76.47
33	PAPUA BARAT	225.54	223.60	228.38
34	PAPUA	898.21	914.87	897.69
35	INDONESIA	28513.57	27764.32	27771.22

Data : Badan Pusat Statistik  
(BPS - Statistics Indonesia)

Explore

Take Action

Worldwide

Blogs

Donate



### Indonesia

Indonesia is the most populous country in Southeast Asia and the fourth most populated country in the world. Despite being classified as a lower-middle income country, poverty, inequality and vulnerability are real challenges in the country.

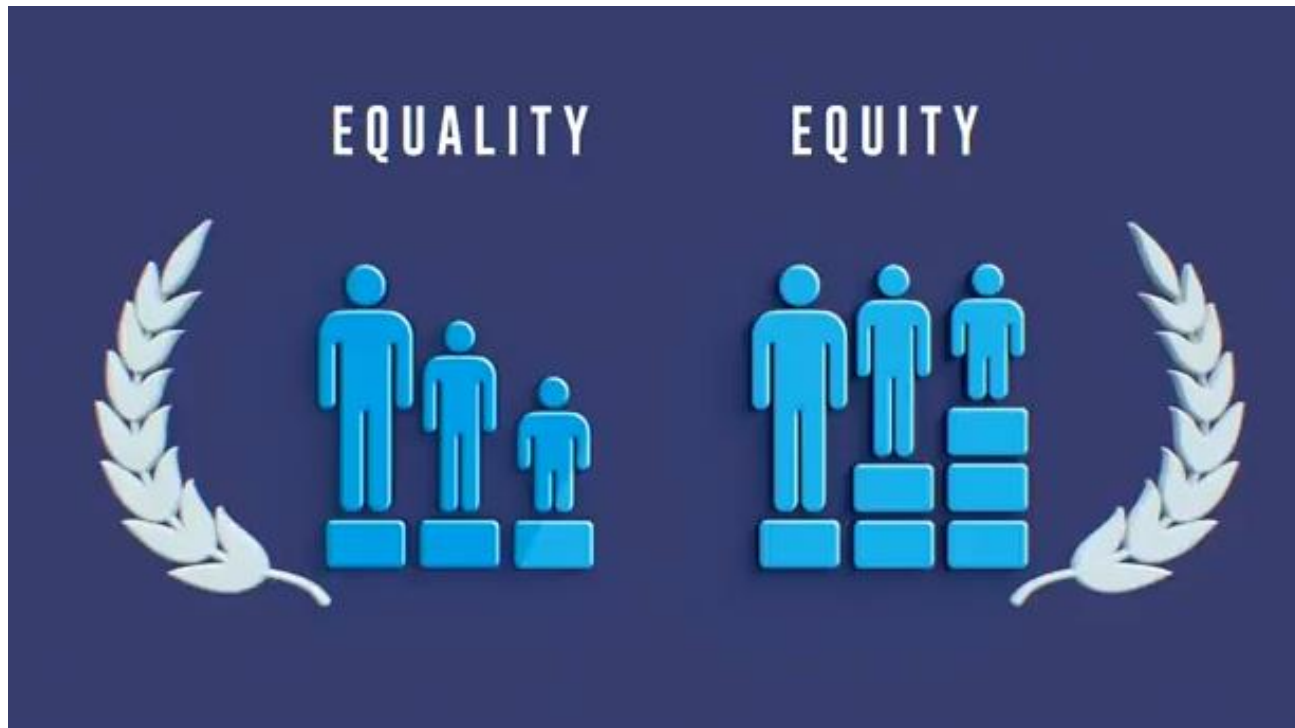
## Inequality in Indonesia: millions kept in poverty



Looking at the future: a father holds his daughter as he stands on a site where residents have recently been evicted from nearby luxury apartments in North Jakarta. Photo: Tiara Audina/Antropology UI

### Other countries in East Asia

In the past two decades, the gap between the richest and the rest in Indonesia has grown faster than in any other country in South-East Asia. It is now the sixth country of greatest wealth inequality in the world. Today, the four richest men in Indonesia have more wealth than the combined total of the poorest 100 million people.



***Equality* : Kesamaan Perlakuan**

***Equity* : Kesempatan yang setara dan berkeadilan**

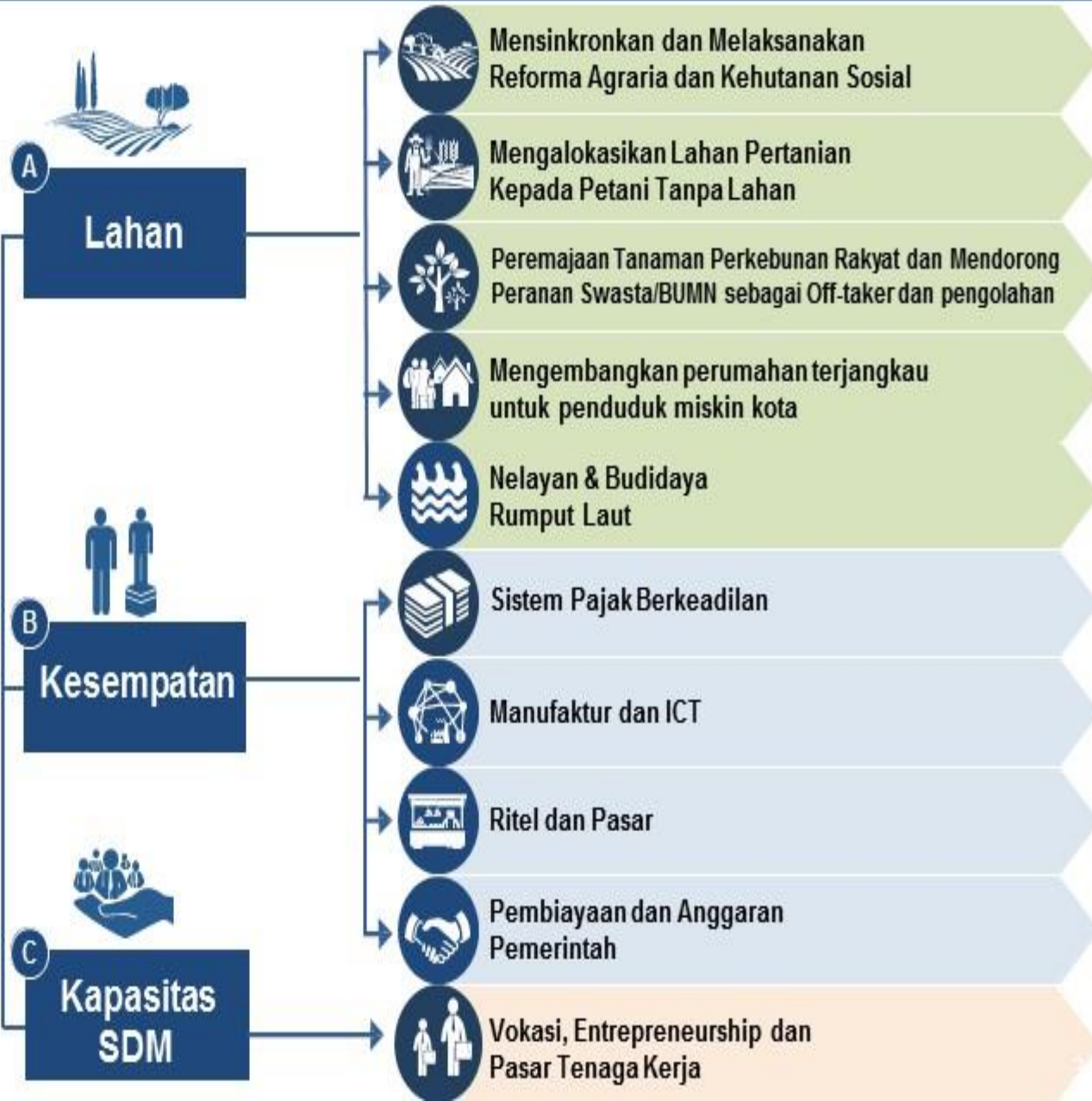


## KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI YANG MENDESAK DI BERBAGAI SEKTOR

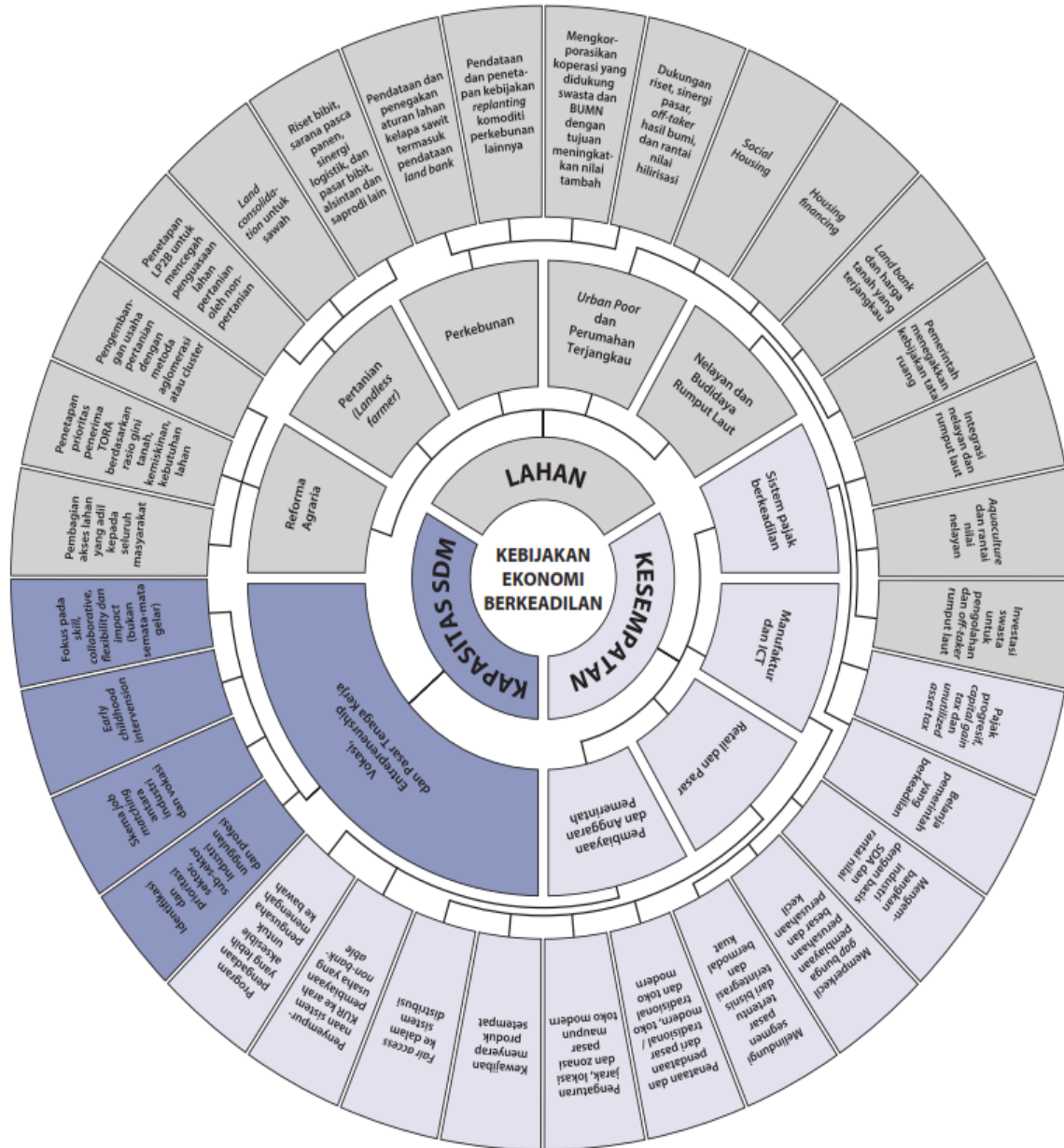
Kebijakan Pemerataan adalah kebijakan Ekonomi Affirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity (terutama lahan), kesempatan dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing



KEBIJAKAN  
PEMERATAAN  
EKONOMI



# SKEMATIK KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN





**INDONESIA SEJAHTERA  
ADIL, MAKMUR  
DAN MERATA**

# Tugas

- Analisa indikator dan faktor-faktor penyebab kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia
- Mahasiswa mampu menyusun konsep penanggulangan masalah kemiskinan di di berbagai provinsi di Indonesia